



BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERAN STRATEGIS DAN PROFIL
PERANGKAT DAERAH
2026



Lokasi

📍 Jl. Woltermonginsidi Komplek Kantor
Bupati Gedung Bappeda-Brida Lantai
4, Tenggarong

Hubungi Kami

🌐 <https://brida.kukarkab.go.id>

✉ brida@kukarkab.go.id

DAFTAR ISI

A. Latar Belakang	4
B. Landasan Hukum dan Kedudukan	5
1.1 Dasar Hukum Pembentukan BRIDA	5
1.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah	5
1.3 Kedudukan BRIDA dalam Struktur Pemerintahan Daerah	6
C. Peran Strategis BRIDA dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan Daerah	7
1.1 BRIDA sebagai Penggerak Kebijakan Berbasis Bukti	7
1.2 BRIDA sebagai Integrator Inovasi Daerah	7
1.3 BRIDA sebagai Fasilitator Pengembangan Potensi Lokal	7
1.4 BRIDA sebagai Mitra Strategis Perencanaan Pembangunan Berbasis Wilayah	7
1.5 BRIDA dalam Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Digital	8
1.6 Matriks Peran Strategis BRIDA	8
D. Kondisi Eksisting BRIDA Kabupaten Kutai Kartanegara	8
1.1 Keberadaan Sumber Daya Manusia (ASN-PPPK)	14
1.2 Keberadaan Sarana dan Prasarana	15
1.3 Skema Peran Strategis BRIDA	18
1.4 Program Prioritas BRIDA Kutai Kartanegara 2020–2025	22
1.5 Lembaga/Institusi Mitra Kerjasama	22
E. Tantangan dan Penguatan Peran BRIDA	22
1.1 Tantangan Penguatan Peran BRIDA	22
1.2 Strategi Penguatan Kelembagaan BRIDA	23
1.3 Penerbitan Jurnal Ilmiah, Buletin, Website, dan Media Sosial	23
1.4 Perpustakaan	25
F. Pelayanan Publik BRIDA	25
1.1 Jenis Pelayanan Publik	25
1.2 Maklumat Pelayanan	26
G. Prestasi dan Penghargaan yang Diraih	28
H. Penutup	32
1.1 Kesimpulan	32
1.2 Rekomendasi	32
Daftar Pustaka	33

Daftar Isi Tabel

• Tabel 1.1 – PNS-PPPK berdasarkan Jenis dan Kelas Jabatan	9
• Tabel 1.2 – PNS-PPPK berdasarkan Pangkat dan Golongan	10
• Tabel 1.3 – PNS-PPPK berdasarkan Masa Kerja	11
• Tabel 1.4 – PNS-PPPK berdasarkan Tingkat Pendidikan	12
• Tabel 1.5 – PNS-PPPK berdasarkan Jenis Kelamin	13
• Tabel 2.1 – Prasarana Gedung dan Ruang	14
• Tabel 2.2 – Sarana Pendukung Kegiatan Riset dan Inovasi	15
• Tabel 2.3 – Sarana Pendukung Mobilitas Kegiatan Riset dan Inovasi	15
• Tabel 3.1 – Matriks Peran Strategis BRIDA	15
• Tabel 1.1 – Program Prioritas Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	18
• Tabel 1.2 – Program Prioritas Bidang Ekonomi dan Pembangunan Daerah	19
• Tabel 1.3 – Program Prioritas Bidang Sosial dan Kependudukan	20
• Tabel 1.4 – Program Prioritas Bidang Inovasi dan Teknologi	21

Daftar Isi Grafik

• Grafik 1.1 – Distribusi ASN berdasarkan Jenis dan Kelas Jabatan	10
• Grafik 1.2 – Distribusi ASN berdasarkan Pangkat dan Golongan	11
• Grafik 1.3 – Distribusi ASN berdasarkan Masa Kerja	12
• Grafik 1.4 – Distribusi ASN berdasarkan Tingkat Pendidikan	13
• Grafik 1.5 – Distribusi ASN berdasarkan Jenis Kelamin	14

PERAN STRATEGIS DAN PROFIL PERANGKAT DAERAH BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

A.LATAR BELAKANG

Otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahannya sendiri berdasarkan prinsip otonomi seluas-luasnya. Kewenangan tersebut menuntut pemerintah daerah untuk mampu merumuskan kebijakan pembangunan yang berbasis data, bukti, dan inovasi, bukan sekadar mengikuti pola pembangunan yang seragam dari pusat ke daerah. Keragaman permasalahan yang dihadapi oleh daerah memerlukan pemecahan komprehensif sebagai bahan perumusan kebijakan dan langkah-langkah strategis Pemerintah Daerah untuk memecahkan masalah Pembangunan (*research based policy*).

Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dimulai sejak era otonomi daerah pada tahun 1999 melalui Perda No. 18 tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 18 Tahun 2016. Untuk menjalankan amanat Peraturan Perundang-undangan yang terkait maka diterbitkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 1 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Riset Dan Inovasi Daerah.

Dalam kerangka itu, kehadiran Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) menjadi sangat relevan. BRIDA dibentuk sebagai konsekuensi dari Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, yang mengamanatkan integrasi tata kelola penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (litbangjirap) di tingkat daerah ke dalam satu kelembagaan yang terintegrasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Kehadiran BRIDA diharapkan menjadi simpul utama dalam mendorong kebijakan pembangunan daerah yang berbasis riset (*evidence-based policy*).

Permasalahannya, banyak pemerintah daerah masih memandang riset dan inovasi sebagai aktivitas pelengkap yang tidak berkaitan langsung dengan capaian pembangunan. Akibatnya, peran BRIDA belum dioptimalkan secara strategis dalam siklus perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah. Kajian ini disusun untuk menelaah secara komprehensif posisi dan peran strategis BRIDA dalam meningkatkan kualitas pembangunan daerah pada era otonomi daerah.

B. LANDASAN HUKUM DAN KEDUDUKAN

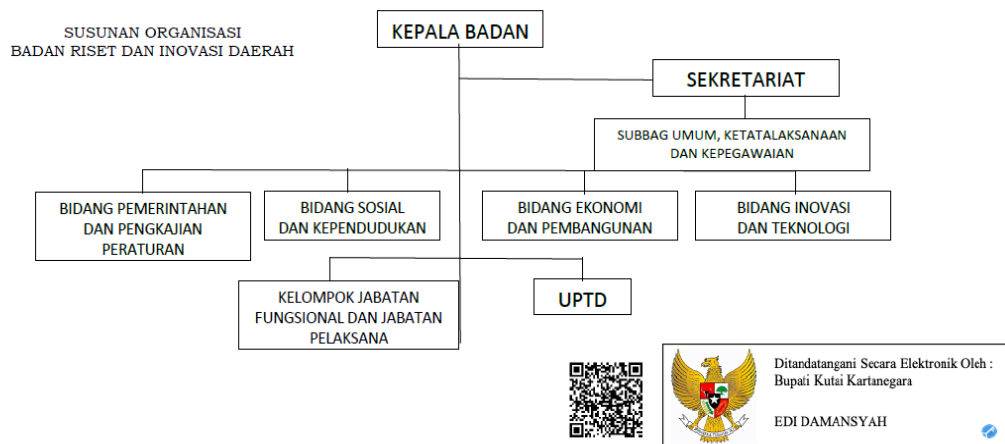
1.1.Dasar Hukum Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah

Pembentukan BRIDA tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari rangkaian kebijakan nasional mengenai sistem riset dan inovasi yang terintegrasi. Beberapa dasar hukum yang melandasi kedudukan BRIDA antara lain:

- a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang menjadi payung hukum penataan ekosistem riset nasional.
- b) Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, yang mengintegrasikan seluruh lembaga penelitian dan pengembangan, termasuk di daerah, ke dalam satu sistem riset dan inovasi nasional.
- c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah, yang menjadi acuan teknis pembentukan kelembagaan BRIDA di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah, yang menjadi kerangka umum kewenangan daerah dalam mengurus urusan pemerintahannya, termasuk urusan penunjang penelitian dan pengembangan.
- e) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- f) Peraturan Bupati No. 1 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

1.2. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 1 TAHUN 2023 TANGGAL 16 JANUARI 2023
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN RISET DAN
INOVASI DAERAH



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Sumber: Perbup Kukar No. 1 Tahun 2023

Regulasi-regulasi tersebut menempatkan BRIDA sebagai perangkat daerah yang menjalankan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, sekaligus sebagai mitra teknis BRIN dalam membina ekosistem riset dan inovasi di tingkat daerah.

1.3. Kedudukan BRIDA dalam Struktur Pemerintahan Daerah

Secara kelembagaan, BRIDA berkedudukan sebagai unsur penunjang pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Posisi ini menempatkan BRIDA tidak sekadar sebagai lembaga teknis di bidang penelitian, tetapi sebagai unsur strategis yang seharusnya dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan daerah, mulai dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), hingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

*Riset tanpa kebijakan hanya menjadi dokumen di atas meja,
sementara kebijakan tanpa riset hanya menjadi tebakan yang mahal.*

C.PERAN STRATEGIS BRIDA DALAM PENINGKATAN KUALITAS PEMBANGUNAN DAERAH

1.1 BRIDA sebagai Penggerak Kebijakan Berbasis Bukti (Evidence-Based Policy)

Salah satu peran paling fundamental BRIDA adalah memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan daerah didasarkan pada data dan hasil kajian yang valid, bukan sekadar asumsi atau kebiasaan administratif. Melalui kajian kebijakan, survei, dan pemetaan potensi daerah, BRIDA dapat menjadi rujukan utama bagi kepala daerah dan perangkat daerah lain dalam merumuskan prioritas pembangunan yang lebih tepat sasaran dan efisien dari sisi anggaran.

1.2 BRIDA sebagai Integrator Inovasi Daerah

BRIDA berperan sebagai simpul yang menghubungkan berbagai aktor inovasi di daerah, mulai dari perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, hingga masyarakat itu sendiri. Dengan adanya Indeks Inovasi Daerah yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri, BRIDA memiliki instrumen untuk memetakan, mendorong, dan mendokumentasikan inovasi-inovasi pelayanan publik maupun tata kelola pemerintahan yang lahir dari inisiatif perangkat daerah.

1.3 BRIDA sebagai Fasilitator Pengembangan Potensi Lokal

Setiap daerah memiliki karakteristik geografis, sosial, dan ekonomi yang berbeda. BRIDA memiliki peran strategis dalam melakukan kajian terhadap potensi unggulan daerah, baik di sektor pertanian, perikanan, pariwisata, maupun industri kreatif, sehingga kebijakan pembangunan dapat lebih kontekstual dan berdaya saing, alih-alih menerapkan pendekatan pembangunan yang seragam tanpa memperhatikan kearifan lokal.

1.4 BRIDA sebagai Mitra Strategis dalam Perencanaan Pembangunan Berbasis Wilayah

Pada level yang lebih teknis, BRIDA juga dapat berperan dalam memberikan rekomendasi kajian terhadap usulan-usulan strategis di daerah, termasuk dalam hal pemekaran wilayah administratif seperti desa, kelurahan, maupun kecamatan. Studi kelayakan dan naskah akademik yang disusun sebagai dasar pengambilan keputusan

administratif idealnya melibatkan BRIDA sebagai mitra kajian ilmiah, sehingga keputusan pemekaran wilayah memiliki landasan akademik dan data yang kuat, bukan semata-mata pertimbangan politis.

1.5 BRIDA dalam Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Digital

Era otonomi daerah saat ini berjalan beriringan dengan transformasi digital pemerintahan. BRIDA dapat mendorong riset terapan terkait penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pengembangan basis data terpadu, serta evaluasi efektivitas layanan publik digital, sehingga pembangunan daerah tidak hanya bertumpu pada infrastruktur fisik tetapi juga pada penguatan tata kelola berbasis data.

1.6 Matriks Peran Strategis BRIDA

Dimensi Peran	Bentuk Kegiatan	Manfaat bagi Pembangunan Daerah
Kebijakan Berbasis Bukti	Kajian kebijakan, survei, riset terapan	Kebijakan lebih tepat sasaran dan efisien
Integrasi Inovasi Daerah	Pemetaan dan replikasi inovasi pelayanan publik	Peningkatan Indeks Inovasi Daerah
Pengembangan Potensi Lokal	Kajian potensi unggulan wilayah	Daya saing ekonomi daerah meningkat
Dukungan Administrasi Wilayah	Studi kelayakan, naskah akademik	Keputusan administratif berbasis data
Tata Kelola Digital	Riset terapan SPBE dan basis data terpadu	Layanan publik lebih efisien dan transparan

D.KONDISI EKSISTING BRIDA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

1. Keberadaan Sumberdaya Manusia (ASN-PPPK)

Sumberdaya manusia merupakan faktor pendukung utama dalam menggerakkan roda organisasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Bupati No. 1 tahun 2023 tentang Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah. Hingga saat ini tahun (2026) jumlah ASN yang bekerja di Badan Riset dan Inovasi Daerah Kab. Kutai Kartanegara adalah sebanyak 98 orang yang terdiri dari 66 PNS dan 32 orang PPPK.

1.1.PNS-PPPK berdasarkan Jenis dan Kelas Jabatan

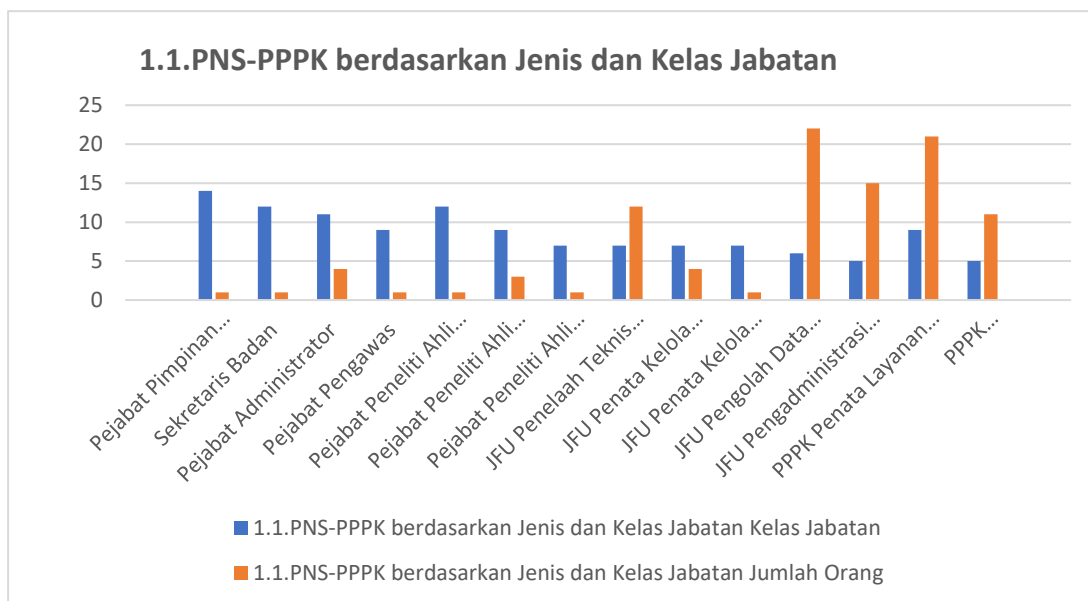
No.	JENIS ASN	JENJANG/ Kelas Jabatan	KELAS JABATAN	Jumlah
1.	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Eselon II/b	14	1 orang
2.	Sekretaris Badan/ Pejabat Administrator	Eselon III/a	12	1 orang
3.	Pejabat Administrator/ Kepala Bidang	Eselon III/b	11	4 orang
4.	Pejabat Pengawas/ Kasubbag Umum, tata laksana dan kepegawaian	Eselon IV/a	9	1 orang
5.	Pejabat Peneliti Ahli Madya	-	12	1 orang
	Pejabat Peneliti Ahli Muda	-	9	3 orang
	Pejabat Peneliti Ahli Pertama	-	7	1 orang
6.	JFU Penelaah Teknis Kebijakan	-	7	12 orang
7.	JFU Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	-	7	4 orang
8.	JFU Penata Kelola Pemerintahan	-	7	1 orang
9.	JFU Pengolah Data dan Informasi	-	6	22 orang
10.	JFU Pengadministrasi Perkantoran	-	5	15 orang
11.	PPPK Penata Layanan Operasional	-	9	21 orang
12.	PPPK Pengadministrasi Perkantoran	-	5	11 orang
	Jumlah ASN			98 orang

Sumber: Data Sekretariat BRIDA Kutai Kartanegara tahun 2026

Berdasarkan data dan informasi pada table di atas dideskripsikan berikut ini :

- Kelas Jabatan yang paling tinggi di BRIDA Kab. Kutai Kartanegara yakni Pejabat Tinggi Pratama pada eselon II/b Kelas Jabatan (14), sedangkan jabatan paling rendah yakni JFU Pengadministrasian Perkantoran dengan kelas Jabatan (5).
- Jumlah ASN paling dominan berada pada jabatan JFU Pengolah Data dan Informasi dengan kelas jabatan (6) dengan jumlah staf ASN sebanyak 22 orang.
- Jumlah ASN paling dominan kedua yakni PPPK Penata Layanan Operasional dengan kelas jabatan (9) dengan jumlah staf sebanyak 21 orang.

- d. Jumlah pegawai ASN paling sedikit terdapat pada JFU Penata Kelola Pemerintahan dengan kelas (7) sebanyak 1 orang. Selanjutnya digambarkan dalam grafik dibawah ini.



Grafik 1.1. Sumber data hasil olahan sendiri tahun 2026

1.2.PNS-PPPK berdasarkan Pangkat dan Golongan

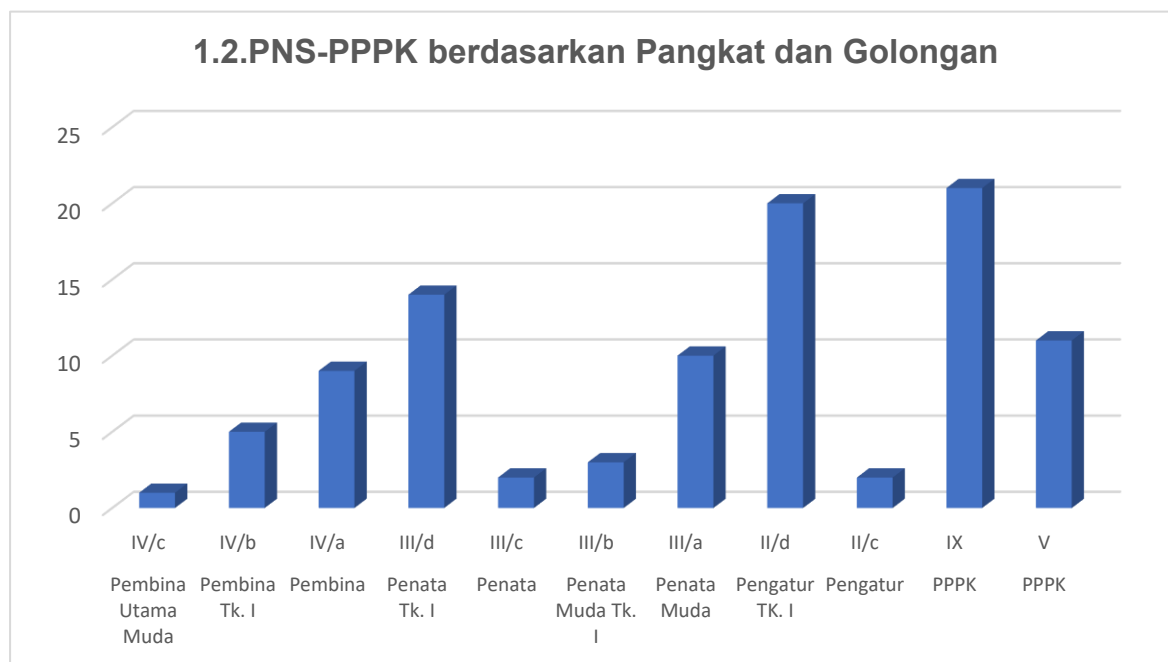
No.	PANGKAT	GOLONGAN	Jumlah
1.	Pembina Utama Muda	IV/c	1 orang
2.	Pembina Tk. I	IV/b	5 orang
3.	Pembina	IV/a	9 orang
4.	Penata Tk. I	III/d	14 orang
5.	Penata	III/c	2 orang
6.	Penata Muda Tk. I	III/b	3 orang
7.	Penata Muda	III/a	10 orang
8.	Pengatur TK. I	II/d	20 orang
9.	Pengatur	II/c	2 orang
10.	PPPK	IX	21 orang
11.	PPPK	V	11 orang

Sumber: Data Sekretariat BRIDA Kutai Kartanegara tahun 2026

Berdasarkan data dan informasi pada tabel di atas dideskripsikan berikut ini :

- a. Pangkat dan Golongan pada PNS yang paling tinggi di BRIDA Kab. Kutai Kartanegara yakni Pembina Utama Muda (IV/c) sedangkan yang paling rendah yakni Pengatur (II/c).

- b. Jumlah ASN paling dominan berada pada pangkat dan golongan yakni Pengatur TK. I (II/c) dengan jumlah staf 20 orang.
- c. Jumlah ASN paling dominan kedua yakni PPPK Penata Layanan Operasional dengan kelas jabatan (9) dengan jumlah staf sebanyak 21 orang.
- d. Jumlah pegawai ASN paling sedikit terdapat pada pangkat dan golongan Penata (III/c) dan Pengatur (II/d) sebanyak 2 orang. Selanjutnya digambarkan dalam grafik dibawah ini.



Grafik 1.2. Sumber data hasil olahan sendiri tahun 2026

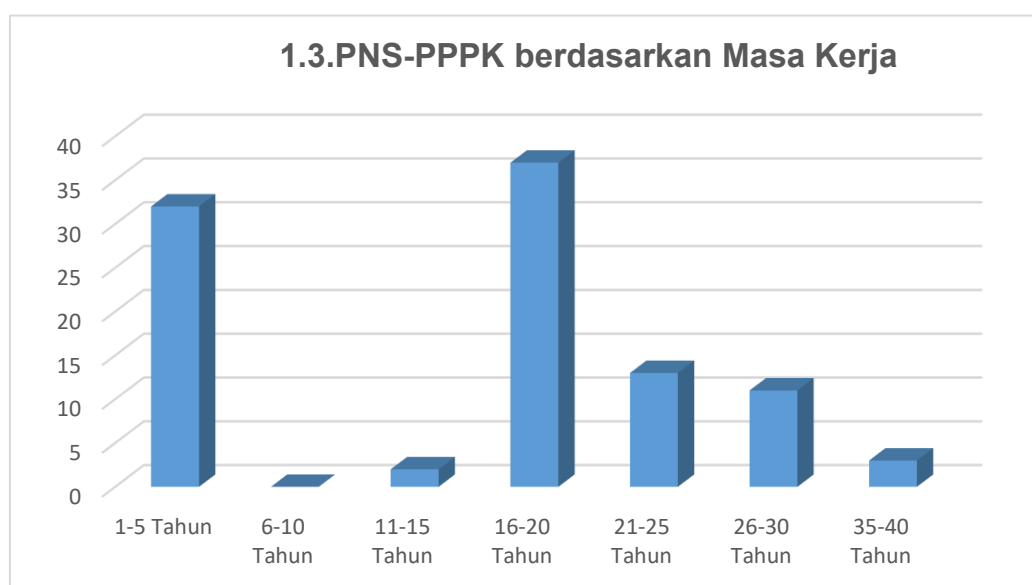
1.3.PNS-PPPK berdasarkan Masa Kerja

No.	RENTANG MASA KERJA	JUMLAH ASN	KET.
1.	1 – 5 Tahun	32 orang	
2.	6 – 10 Tahun	-	
3.	11 – 15 Tahun	2 orang	
4.	16 – 20 Tahun	37 orang	
5.	21 – 25 Tahun	13 orang	
6.	26 – 30 Tahun	11 orang	
7.	35 – 40 Tahun	3 orang	

Sumber: Data Sekretariat BRIDA Kutai Kartanegara tahun 2026

Berdasarkan data dan informasi pada tabel di atas dideskripsikan berikut ini :

- Rentang Masa kerja ASN yang paling lama di BRIDA Kab. Kutai Kartanegara yakni 35 s.d 40 Tahun dengan jumlah staf 3 orang.
- Jumlah ASN paling dominan berdasarkan masa kerja yakni 16 s.d 20 tahun dengan jumlah staf 37 orang.
- Jumlah pegawai ASN paling sedikit berdasarkan masa kerja yakni 11 s.d 15 tahun dengan jumlah staf 2 orang. Selanjutnya digambarkan dalam grafik dibawah ini.



Grafik 1.3. Sumber data hasil olahan sendiri tahun 2026

1.4.PNS-PPPK berdasarkan Tingkat Pendidikan

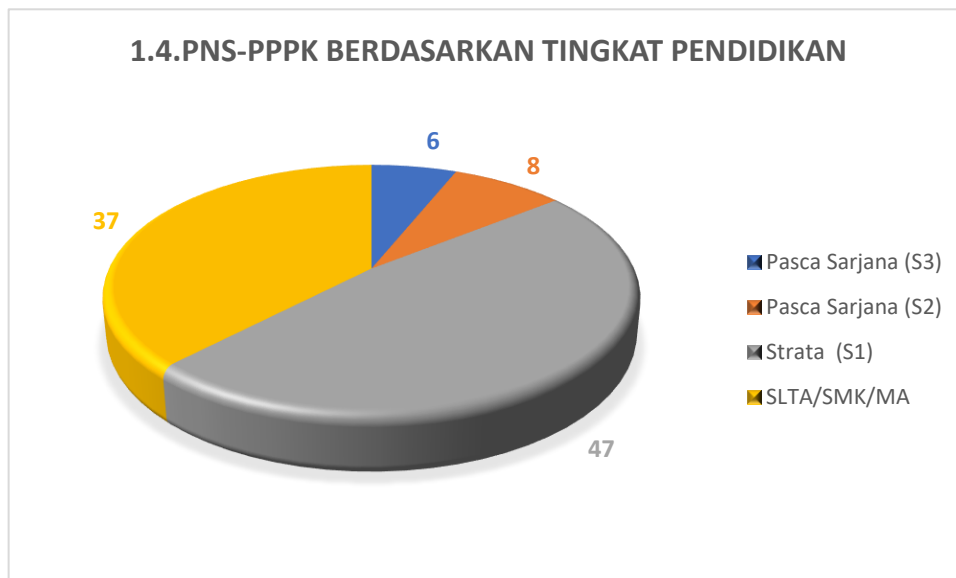
No.	JENJANG	JUMLAH	KET.
1.	Pasca Sarjana (S3)	6 orang	aktif
2.	Pasca Sarjana (S2)	8 orang	aktif
3.	Strata (S1)	47 orang	aktif
4.	SLTA/SMK/MA	37 orang	aktif

Sumber: Data Sekretariat BRIDA Kutai Kartanegara tahun 2026

Berdasarkan data dan informasi pada tabel di atas dideskripsikan berikut ini :

- Tingkat pendidikan ASN yang paling tinggi di BRIDA Kab. Kutai Kartanegara yakni Pasca Sarjana (S3) sedangkan yang paling rendah yakni SLTA/SMK/SMA.
- Jumlah ASN paling dominan berada pada Tingkat pendidikan yakni Strata 1 (S1) dengan jumlah staf 47 orang.

- c. Jumlah ASN paling dominan kedua berada pada Tingkat pendidikan yakni SLTA/SMK/SMA dengan jumlah staf 37 orang.
- d. Jumlah pegawai ASN paling sedikit berdasarkan Tingkat pendidikan yakni Pasca Sarjana (S3) dengan jumlah staf 6 orang. Selanjutnya digambarkan dalam grafik dibawah ini.



Grafik 1.4. Sumber data hasil olahan sendiri tahun 2026

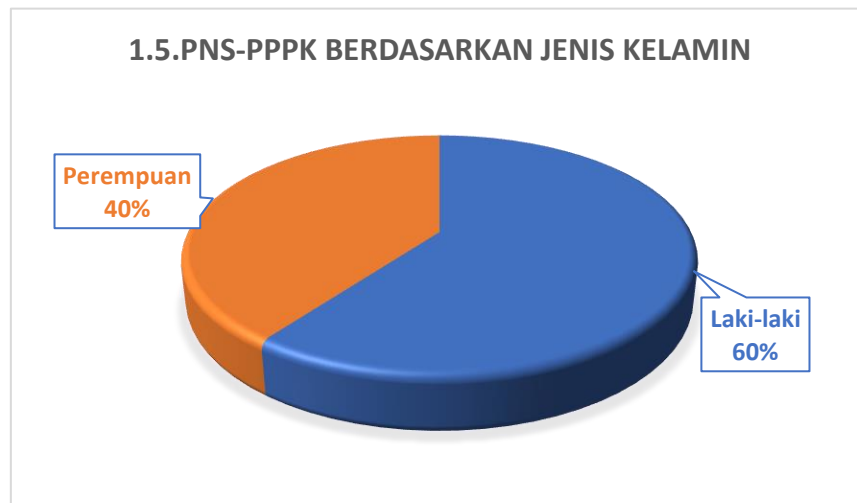
1.5.PNS-PPPK berdasarkan Jenis Kelamin

No.	JENIS KELAMIN	JUMLAH	KET.
1.	Laki - laki	59 orang	aktif
2.	Perempuan	39 orang	aktif
	Jumlah		

Sumber: Data Sekretariat BRIDA Kutai Kartanegara tahun 2026

Berdasarkan data dan informasi pada tabel di atas dideskripsikan berikut ini :

- a. Jumlah ASN Laki-laki sebanyak 59 orang sedang Perempuan 39 orang.
- b. Jika dikaitkan dengan kebijakan Pemerintah pengarusutamaan gender maka di lingkup BRIDA Kutai Kartanegara memiliki komitmen yang cukup tinggi.



Grafik 1.5. Sumber data hasil olahan sendiri tahun 2026

2. Keberadaan Sarana Prasarana

2.1. Prasarana Gedung dan Ruangan

Prasarana Gedung Badan Riset dan Inovasi Daerah telah digunakan sejak tahun 2010 yang terdiri dari 1 lantai yakni lantai 4 yang terintegrasi dengan gedung BAPPEDA Kab. Kutai Kartanegara yang terdiri dari lantai 1 s/d 3. Adapun Ruangan di lingkup BRIDA Kutai Kartanegara terdiri dari:

No.	JENIS RUANGAN	UKURAN	KET.
1.	Ruang Kepala Badan		1 Ruang
2.	Ruang Sekretaris Badan		1 Ruang
3.	Ruang Kepala Bidang		4 Ruang
4.	Ruang Kasubbag Umum		1 Ruang
5.	Ruang Staf		5 Ruang
6.	Ruang Aula/Seminar/Workshop		1 Ruang
7.	Ruang Penyimpanan BMD		2 Ruang
8.	Mushola		1 Ruang
	Jumlah		16 Ruang

Sumber: Data Sekretariat BRIDA Kutai Kartanegara tahun 2026

2.2. Sarana Pendukung Kegiatan Riset dan Inovasi

Sarana Pendukung kegiatan Riset dan Inovasi termasuk Seminar/ Workshop/Bintek/ Diseminasi/Lomba Karya Ilmiah dll di lingkup BRIDA Kab. Kutai Kartanegara cukup bervariasi yang terdiri dari; Computer LCD, Computer PC, Printer, Vidio tron dengan kondisi aktual berikut ini;

No.	JENIS BARANG	Jenis/Merk	JUMLAH	KET./FOTO
1.	Computer LCD dan PC	Lenovo, Simbada	32 unit	baik
2.	Laptop	Accer, Sony Vaio	16 unit	baik
3.	Printer	Epson, Canon	32 unit	baik
4.	Proyektor	Toshiba, New Mark	5 unit	baik
5.	Vidiotron		1 paket	rusak
6.	Kamera	Canon	4 Unit	baik

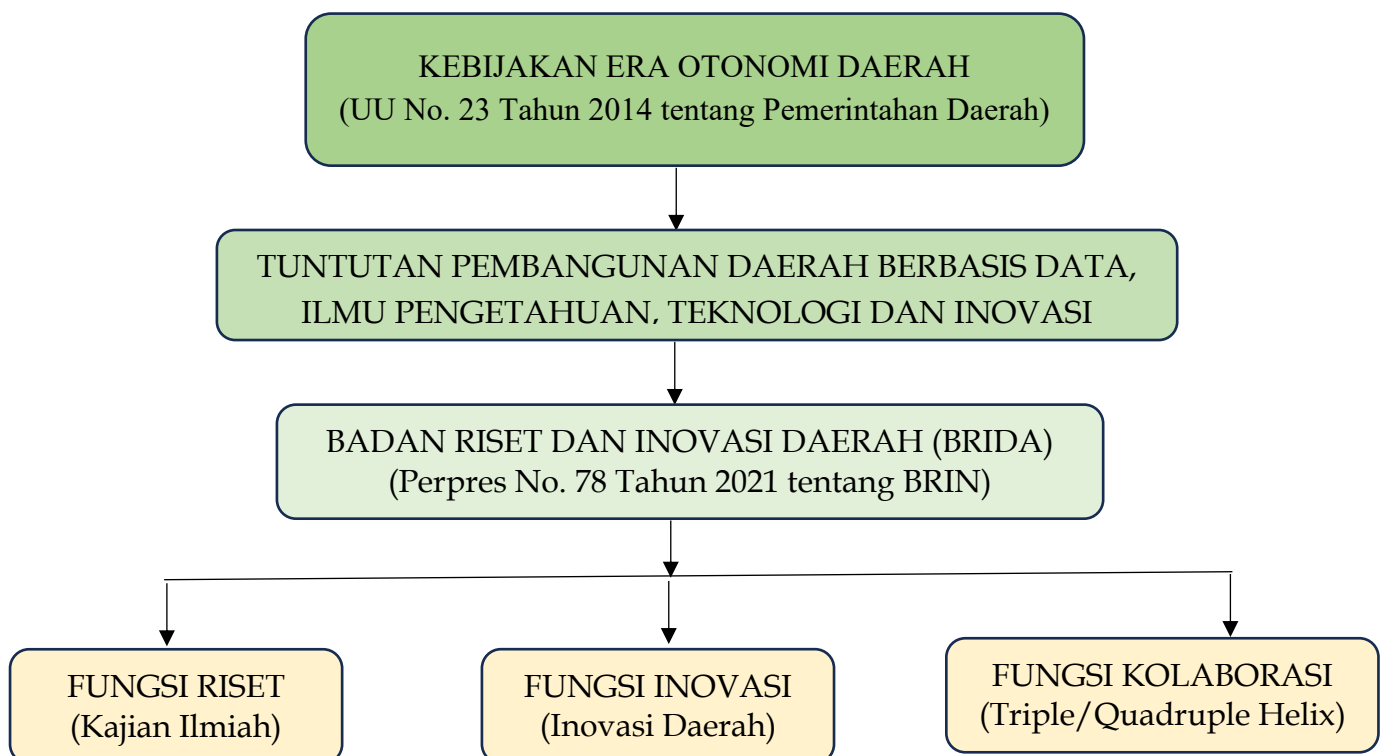
Sumber: Data Sekretariat BRIDA Kutai Kartanegara tahun 2026

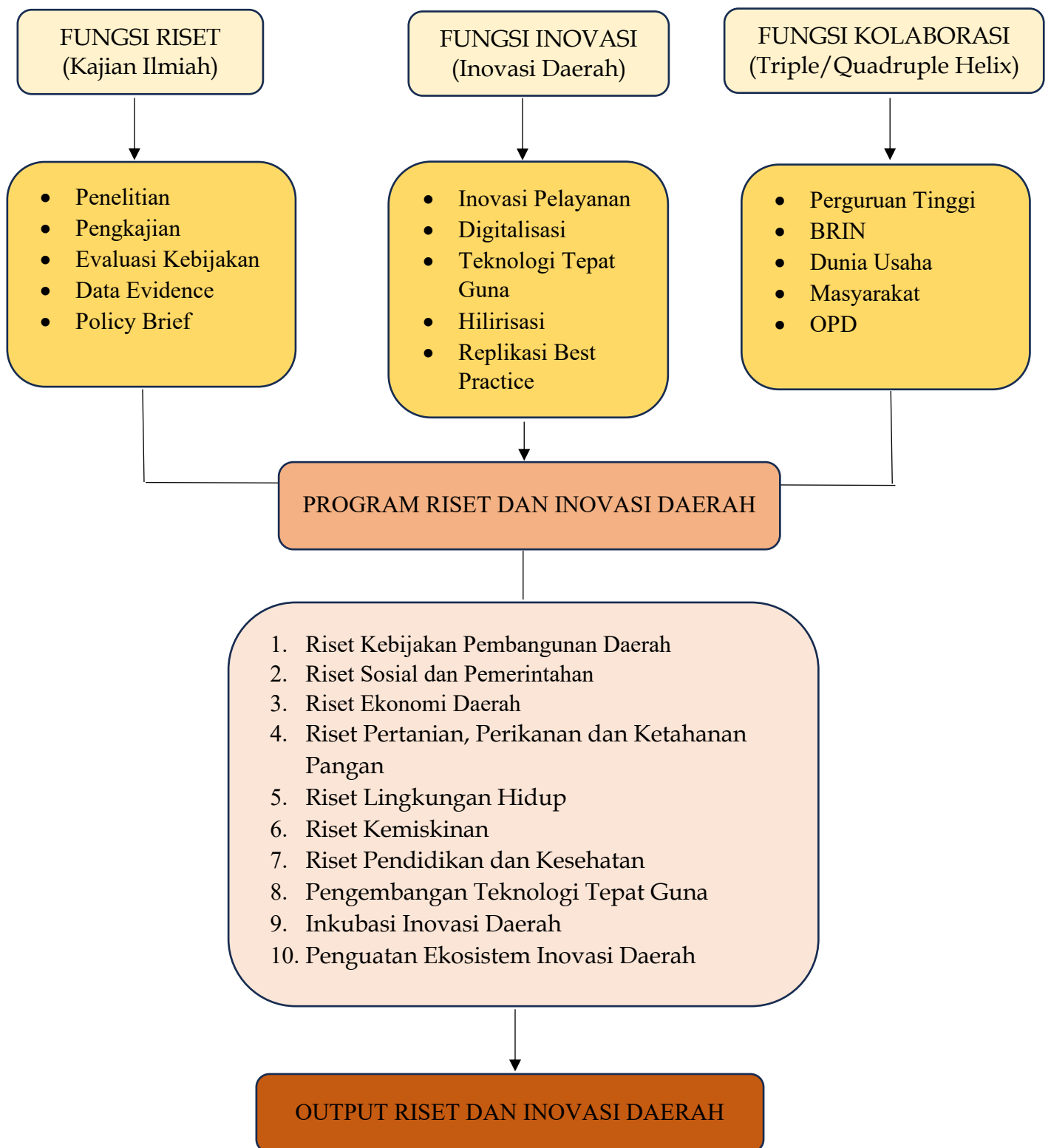
2.3. Sarana Pendukung mobilitas kegiatan Riset dan Inovasi

No.	JENIS Kendaraan	Jenis/Merk	JUMLAH	KET.
1.	Kendaraan Roda 4	Toyota, Ford	3	baik
2.	Kendaraan Roda 2	Honda, Yamaha	27	baik

Sumber: Data Sekretariat BRIDA Kutai Kartanegara tahun 2026

3. Skema Peran Strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah







4. Program Prioritas BRIDA Kutai Kartanegara tahun 2020 - 2025

Adapun Program dan Kegiatan Prioritas BRIDA Kutai Kartanegara antara lain:

1.1. Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

No.	Topik Riset dan Inovasi	Tahun
1	Kajian Pemekaran Pengembangan Wilayah Kecamatan	2020
2	Kajian tentang Standarisasi biaya sertifikasi tanah di Kabupaten Kukar	2013
3	Kajian tentang evaluasi kinerja aparatur	2012
4	Analisis tingkat kedisiplinan PNS terhadap Produktifitas kinerja di Kabupaten Kutai Kartanegara	2015
5	Kajian tentang implementasi Keppres No. 80 tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara	2010
6	Evaluasi dan Monitoring terhadap kegiatan Penelitian di Kabupaten Kutai Kartanegara	2012
7	Peningkatan Koordinasi Kelitbangan di Kabupaten Kutai Kartanegara	2014
8	Kajian Optimalisasi Penerapan Regulasi Terkait Kemudahan Investasi Daerah	2020
9	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	2021
10	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	2022,2025
11	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	2022-2024, 2026
12	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	2023-2024
13	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	2023-2024
14	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	2023-2025

No.	Topik Riset dan Inovasi	Tahun
15	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	2025
16	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	2025
17	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	2026

Sumber: Data Sekretariat BRIDA Kutai Kartanegara tahun 2026

1.2. Bidang Ekonomi dan Pembangunan Daerah

No.	Topik Riset dan Inovasi	Tahun
1	Kajian Investasi dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan	2013
2	Analisis Profil Investasi	2015
3	Kajian Pemberdayaan UKM	2016
4	Studi Peranan Peranan Usaha Modal Gerbang Dayaku terhadap pertumbuhan Ekonomi	2014
5	Analisis Struktur Ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara	2015
6	Studi tentang Potensi Keuangan Daerah	2017
7	Profile Komoditas Unggulan Kabupaten Kutai Kartanegara	
8	Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Kabupaten Kutai Kartanegara	2017
9	Fasilitasi Rencana Pembangunan Program Pendidikan Vokasi di Kabupaten Kutai Kartanegara	2018
10	Hasil Penelitian Pemetaan Kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara	2019
11	Kajian Nilai Tukar Petani (NTP) Lingkup Pertanian dan Perikanan	2020
12	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	2021,2023 s.d 2026
13	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2022 s.d 2024, 2026

No.	Topik Riset dan Inovasi	Tahun
14	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	2022 s.d 2024, 2026
15	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	2023
16	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	2023-2024
17	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	2023-2024
18	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	2025
19	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	2025

Sumber: Data Sekretariat BRIDA Kutai Kartanegara tahun 2026

1.3. Bidang Sosial dan Kependudukan

No.	Topik Riset dan Inovasi	Tahun
1	Kajian tentang makanan yang mengandung asam boraks/formalin	2010
2	Penelitian tentang Arkeologi Situs Kerajaan Kutai Martadipura	2007
3	Kajian Implementasi UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Kabupaten Kutai Kartanegara	2012
4	Studi tentang KDRT di Kab. Kutai Kartanegara	2013
5	Penyelamatan Situs Cagar Budaya Muara Kaman	
6	Survei Indeks Partisipasi Masyarakat (IPM) di Kab. Kutai Kartanegara	2020
7	Fasilitasi Lanjutan Kerajaan Kutai Mulawarman Ing Martadipura	2020
8	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	2021 s.d 2025
9	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Aspek Sosial	2022, 2024-2025

10	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	2023 s.d 2025
11	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	2022 s.d 2026
12	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	2024
13	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	2024

Sumber: Data Sekretariat BRIDA Kutai Kartanegara tahun 2026

1.4. Bidang Inovasi dan Teknologi

No.	Topik Riset dan Inovasi	Tahun
1	Kajian klasifikasi dan kriteria mutu air	2012
2	Survey Kapasitas Keanekaragaman Hayati Hutan lindung di Muara Kaman	2013
3	Kajian Sedimentasi Danau Semayang dan Danau Melintang terhadap potensi Ekonomi masyarakat sekitar	2003
4	Penelitian Uji Adaptasi tanaman Jarak Pagar (<i>Jatropha Curcas</i>).	2005
5	Kajian tentang Teknologi Pengolahan sampah bernilai ekonomis	2008
6	Fasilitasi Rencana Pembangunan Program Pendidikan Vokasi di Kabupaten Kutai Kartanegara	2020
7	Fasilitasi Rencana Induk Kelitbangan	2020
8	Fasilitasi Lanjutan Pemutihan Padi Lokal Sebagai Plasma Nutfah di Kabupaten Kutai Kartanegara	2021
9	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	2021 s.d 2026
10	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	2021 s.d 2025
11	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	2022 s.d 2025
12	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	2023 s.d 2025
13	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	2025 s.d 2026

Sumber: Data Sekretariat BRIDA Kutai Kartanegara tahun 2026

5. Lembaga / Institusi mitra kerjasama BRIDA Kab. Kutai Kartanegara:

1. Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda
2. Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) Tenggarong
3. Institut Teknologi Kalimantan (ITK) Balikpapan
4. Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta
5. Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
6. Universitas Widya Gama Mahakam (UWGM) Samarinda
7. Politeknik Negeri Samarinda
8. Universitas Negeri Malang
9. BRIN – Bidang Limnologi Cibinong
10. BRIN – Puspitek Serpong
11. BAKOSURTANAL Cibinong
12. Badan Pengkajian Strategis Kemendagri
13. PAKAR Kalimantan di Banjarmasin
14. Balai POM Pusat Jakarta
15. Balai POM Samarinda

E. TANTANGAN DAN PENGUATAN PERAN BRIDA

1.1. Tantangan Penguatan Peran BRIDA

Meskipun secara regulatif kedudukan BRIDA cukup kuat, dalam praktiknya terdapat sejumlah tantangan yang menghambat optimalisasi peran strategisnya, antara lain:

1. Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi peneliti, sebagian besar pegawai BRIDA di daerah berasal dari mutasi struktural tanpa latar belakang riset.
2. Minimnya alokasi anggaran daerah untuk kegiatan penelitian dan pengembangan dibandingkan dengan urusan pembangunan fisik.
3. Lemahnya keterlibatan BRIDA dalam siklus perencanaan pembangunan daerah, sehingga hasil kajian sering tidak terhubung langsung dengan dokumen perencanaan seperti RPJMD dan RKPD.
4. Belum optimalnya kolaborasi BRIDA dengan perguruan tinggi dan dunia usaha dalam membangun ekosistem inovasi daerah yang berkelanjutan.

5. Tumpang tindih kewenangan antara BRIDA dengan perangkat daerah lain, khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dalam hal kajian kebijakan.

1.2.Strategi Penguatan Kelembagaan BRIDA

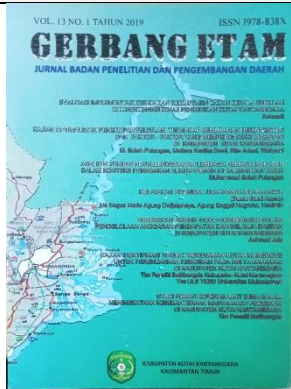
Berdasarkan tantangan tersebut, terdapat beberapa langkah strategis yang dapat ditempuh untuk memperkuat peran BRIDA dalam pembangunan daerah, yaitu:

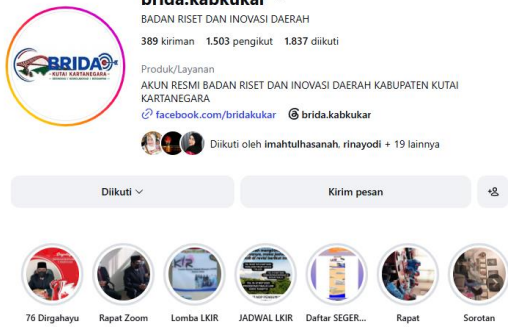
1. Penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui rekrutmen dan pembinaan jabatan fungsional peneliti serta pelatihan metodologi riset terapan.
2. Penyusunan mekanisme formal yang menjamin keterlibatan BRIDA dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan daerah, termasuk forum konsultasi publik dan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).
3. Peningkatan alokasi anggaran daerah untuk kegiatan litbangjirap sebagai bagian dari investasi jangka panjang pembangunan daerah.
4. Penguatan kemitraan strategis dengan perguruan tinggi, BRIN, dan sektor swasta melalui skema kolaborasi riset dan inovasi daerah (knowledge-sharing platform).
5. Penegasan pembagian peran yang jelas antara BRIDA dan Bappeda, di mana BRIDA berperan sebagai penyedia bukti dan kajian ilmiah, sementara Bappeda berperan sebagai pengintegrasikan kebijakan dalam dokumen perencanaan.

1.3.Penerbitan Jurnal Ilmiah, Buletin, Website, dan Media Sosial

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat diikuti kebutuhan penyampaian data dan informasi secara cepat dan tepat sasaran menjadi tantangan tersendiri bagi institusi Badan Riset dan Inovasi Daerah. Lembaga Riset hendaknya mampu mengambil peran dan menjadikan institusi ini sebagai pusat informasi (data base) yang dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan dan masyarakat luas. Hal ini penting, karena ketersediaan Sistem Informasi dan Database pada Badan Litbang dapat diarahkan untuk mendukung terwujudnya penetapan kebijakan Pemerintah daerah berbasis riset /penelitian.

Di bawah ini merupakan media Komunikasi dan Informasi tentang Kegiatan Riset dan Inovasi daerah agar dapat diakses oleh masyarakat luas agar memberikan kontribusi yang positif antara lain:

No.	Nama Terbitan	No. ISSN/ Pasword	Photo Cover
1.	Jurnal Ilmiah "Gerbang Etam"	ISSN 1978-838X	
2.	Buletin "Gerbang Balitbangdaku"		
3.	Website " BRIDA Kukar	https://brida.kukarkab.go.id/	

4.	Face Book "BRIDA Kukar	https://www.facebook.com/share/1BjG3LP4at/	 BRIDA KUKAR 1,5 rb pengikut • 17 mengikuti Postingan Tentang Reels Foto Intro Halaman ini dibuat sebagai corong informasi kepada publik mengenai kegiatan maupun program di BRIDA BRIDA KUKAR 16 Jan 2026 BRIDA Kukar melaksanakan Pendampingan Penginputan Data IIS 2026 Puskesmas Muara Jawa #BRIDAKukar #IIS2026 #Kukardamankarbaik #inovasiKukar #bridakukar #puskesmasmuarajawa Halaman · Organisasi Pemerintah
5.	Instagram	https://www.instagram.com/brida.kabkukar	 brida.kabkukar ... BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 389 kiriman · 1.503 pengikut · 1.837 diikuti Produk/Layanan AKUN RESMI BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA facebook.com/bridakukar brida.kabkukar Diikuti oleh imahutlhasanah, rinayodi + 19 lainnya Diikuti Kirim pesan 76 Dirgahayu Rapat Zoom Lomba LKIR JADWAL LKIR Daftar SEGER... Rapat Sorotan

1.4.Perpustakaan

No.	Nama Terbitan	Kode referensi	Jumlah Koleksi
1.			
2.			
3.			

F.PELAYANAN PUBLIK BRIDA

1.1.Jenis Pelayanan Publik

Berdasarkan Surat edaran Menteri PANRB No. 5 tahun 2023 bahwa setiap Perangkat Daerah harus melaksanakan evaluasi kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) secara mandiri, oleh karena itu Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara harus menyiapkan berbagai dokumen administrasi dan kelengkapan lainnya.

Di bawah ini ditampilkan beberapa Dokumen tentang Pelayanan Publik dilingkup Badan Riset dan Inovasi daerah Kabupaten Kutai Kartanegara antara lain:

- Layanan BRIDA dan Survey Kepuasan Masyarakat



Informasi :

Berdasarkan SK Kepala BRIDA Kab. Kutai Kartanegara Jenis Layanan terdiri dari:

1. Pelayanan hasil riset dan inovasi
2. Pelayanan Pengaduan masyarakat
3. Fasilitas Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual
4. Publikasi Jurnal Penelitian Ilmiah
5. Fasilitas Kemitraan Riset dan Inovasi Daerah
6. Permohonan Rekomendasi/kegiatan Riset Mahasiswa/Siswa dan Instansi.



Informasi :

Berdasarkan hasil Survey kepuasan masyarakat (SKM) Priode 1 Januari – 31 Desember 2025 terhadap atas layanan BRIDA terhadap masyarakat dikategorikan **SANGAT BAIK (85)**

- Maklumat Pelayanan



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Jl. Wotter Monginadi Komplek Kantor Bupati Gedung Bappeda - Balikpapan Lt. 4 Tenggarong Telp. (0541) 6669156 Fax (0541) 6669155
 Lembar - http://krida.kutai.kab.go.id / Pos-el - bidd@krida.kutai.kab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Nomor : B. 37/Brida/P1.1/100.3.3/3/2026

TENTANG

PENETAPAN "MAKLUMAT" PELAYANAN PADA
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan serta berkomitmen memberikan pelayanan yang profesional, cepat, tepat, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Untuk itu kami menyatakan bahwa:

1. Kami berjanji dan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.
2. Kami berjanji memberikan pelayanan secara profesional, mudah, cepat, tepat, transparan, dan tidak diskriminatif.
3. Kami berkomitmen melakukan perbaikan pelayanan secara berkelanjutan berdasarkan evaluasi dan masukan masyarakat.
4. Kami bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan.

Ditetapkan di : Tenggarong
 Pada tanggal : 2 Maret 2026

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



Dr. Bahari Jokosusilo, S.Pt., M.M.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19670921 199803 1 005

Informasi :

Berdasarkan hasil Ketentuan PerMENPAN RB bahwa setiap Institusi Pemerintah wajib menampilkan Maklumat yang dipublis lewat media elektronik dan cetak.

G.PRESTASI DAN PENGHARGAAN YANG DIRAIH

1.1.Penghargaan yang diraih

Informasi : Piagam Penghargaan Mitra Kerja kepada Badan Riset dan Inovasi Kutai Kartanegara yang telah mendorong pengembangan novasi daerah melalui kolaborasi riset dan pengutan kebijakan berbasis data.



Informasi : Berdasarkan Arsip Konservasi Prastasti Yupa Muara Kaman Kutai Kartanegara, Badan Riset Inovasi Daerah Kab. Kutai Kartanegara sebagai Memori Kolektif Bangsa Tahap II Tahun 2025.



Informasi: Berdasarkan hasil Penilaian Tim Penilai Tahun 2024 BRIDA Kab. Kutai Kartanegara meraih Terbaik III Bidang Pengembangan IPTEK dan Inovasi.



Informasi : Berdasarkan Mulawarman University Award Tahun 2023, BRIDA Kab. Kutai Kartanegara "Kompetisi hasil-hasil Pembangunan Antar Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur" Nominator Very Good Region in a Leading Profile Political Institutionalization.



Informasi : Berdasarkan hasil Penilaian Tim Penilai Tahun 2026, BRIDA sebagai OPD Teraktif dalam melaksanakan dan melaporkan Indonesia ASRI.



Informasi : Berdasarkan hasil Penilaian Tim Penilai Pengawasan Arsip Tahun 2023, BRIDA sebagai Organisasi Perangkat Daerah dengan Kinerja Terbaik Berdasarkan Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2023 dengan Kategori Sangat Baik.



Informasi : Berdasarkan hasil Penilaian Tim Penilai Arsip Tahun 2023, BRIDA Terbaik 1 Perangkat Daerah yang Melaksanakan Pemindahan Arsip In-Aktif Sekurang-kurangnya 10 Tahun.



Informasi : Berdasarkan hasil Penilaian Tim Penilai Arsip Tahun 2023, Balitbangda Terbaik 1 Perangkat Daerah yang Melaksanakan Pemindahan Arsip In-Aktif Sekurang-kurangnya 10 Tahun.



Informasi : Berdasarkan hasil Penilaian Tim Penilai Arsip Tahun 2020, Balitbangda sebagai OPD yang Tepat Waktu dalam Penyampaian Laporan Keuangan Tahun 2019.



Informasi : Berdasarkan hasil Penilaian Tim Penilai, Balitbangda atas partisipasinya pada kegiatan Penilaian dan Standarisasi E-Government Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020.



Informasi : Berdasarkan hasil Penilaian Tim Penilai Arsip, Balitbangda sebagai Terbaik III Pengelolaan Arsip Tahun 2019.



Informasi : Berdasarkan hasil Penilaian Tim Penilai, Balitbangda berperan Aktif TIM BEKIAS OPD dalam rangka pelaksanaan RB dan Partisipasi penyelenggaraan Gelar mamajemen Perubahan dan Inovasi ke-3 dengan judul Inovasi "PAMAN RIJAL".



Informasi : Berdasarkan hasil Penilaian Tim Penilai, Balitbangda atas Prestasi memperoleh Nilai Evaluasi LKJIP "78,19" dengan Predikat "BB" tahun 2017.



Informasi : Berdasarkan hasil Penilaian Tim Penilai, Balitbangda sebagai 10 UPZ Teraktif Tahun 2017 dalam menghimpun dana zakat, infaq dan shodaqah di lingkungan kerjanya, serta menyalurkannya kepada mustahiq melalui Baznas Kab. Kukar.



H. PENUTUP

1.1 Kesimpulan

BRIDA memiliki kedudukan strategis dalam tata kelola pemerintahan daerah di era otonomi daerah sebagai penggerak kebijakan berbasis bukti, integrator inovasi, fasilitator pengembangan potensi lokal, mitra kajian administrasi wilayah, dan pendorong tata kelola digital. Namun, peran strategis tersebut belum berjalan optimal akibat keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta lemahnya integrasi BRIDA dalam siklus perencanaan pembangunan daerah.

1.2 Rekomendasi

Pemerintah daerah perlu memberikan perhatian yang lebih serius terhadap penguatan kelembagaan BRIDA, baik melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan anggaran, maupun penegasan mekanisme keterlibatan BRIDA dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan, agar kualitas pembangunan daerah dapat ditingkatkan secara berkelanjutan dan berbasis bukti ilmiah.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah.
- Badan Riset dan Inovasi Nasional Pedoman Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan BRIDA.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Indeks Inovasi Daerah.